

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap bangsa dan negara memiliki kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kebutuhan tersebut tidak selalu dipenuhi oleh potensi setiap negara itu sendiri. Keadaan yang demikian mendorong sebuah negara untuk saling menjalin hubungan antar negara. Setiap negara memiliki posisi yang berbeda-beda, baik dalam bidang ekonomi, keamanan, politik maupun sumber daya manusia atau SDM. Dengan demikian setiap negara tidak dapat lepas dari keterlibatannya dengan negara lain dalam bentuk hubungan kerja sama antar negara. Dougherty dan Pfaltzgraff (1997) mengemukakan bahwa kerja sama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi di mana kurangnya institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara budaya, dan terpisah secara geografis.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan terjalin sejak pembukaan hubungan diplomatik kedua negara yang terjadi pada tahun 1966 yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam berbagai bidang. Sejak hubungan bilateral dibuka pada tahun 1966,

hubungan kedua negara selalu berjalan dengan baik dan hampir tidak ada masalah. Selain menjaga hubungan baik pada tingkat bilateral, kedua negara juga saling memberikan dukungan di berbagai forum regional maupun internasional. Hubungan yang erat ini terlihat pada peningkatan pesat kerja sama dalam 5 (lima) tahun terakhir yang semakin terlihat karena bertambahnya ikatan kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang mencakup politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya.

Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia dan Korea Selatan berada dalam posisi yang saling melengkapi, yakni kedua negara tersebut berpotensi untuk mengisi antara satu dengan yang lain. Terlihat dari kondisi masing-masing negara yang masih membutuhkan negara lainnya untuk melengkapi kebutuhan dalam negerinya. Di pihak Indonesia memerlukan modal/investasi, teknologi dan produk-produk teknologi. Sedangkan dari lain pihak, Korea Selatan memerlukan sumber alam/mineral, tenaga kerja, serta pasar Indonesia yang besar. Bagi Indonesia, Korea Selatan merupakan alternatif sumber teknologi khususnya di bidang heavy industry, IT dan telekomunikasi.

Hubungan dan kerja sama bilateral Indonesia dan Korea Selatan semakin dekat setelah kedua negara menandatangani beberapa deklarasi kemitraan strategis yang berkembang dengan baik di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kerja sama yang terbentuk

antara Indonesia dan Korea Selatan untuk pertama kalinya berupa kerja sama ekonomi dan teknik. Untuk meningkatkan kerja sama tersebut, pada tanggal 21 April 1971 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan menandatangani sebuah dokumen kesepakatan kerja sama ekonomi dan teknik yang disebut sebagai *Agreement Regarding Economic and Technical Cooperation and Trade Promotion between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea*. Kerja sama ini merupakan sebuah persetujuan awal mengenai kerja sama ekonomi dan teknik serta pengembangan perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan yang membuka hubungan kedua Negara menjadi lebih erat.

Selama berlangsungnya hubungan kenegaraan yang akrab, kedua negara telah membuat 28 persetujuan antar pemerintah yang semakin meningkat tiap dasawarsa. Pada dasawarsa 1970-an, kedua negara hanya menandatangani 2 buah persetujuan. Pada dasawarsa 1980-an, jumlah persetujuan yang ditandatangani oleh kedua negara, meningkat menjadi 6 buah, sepanjang dasawarsa 1990-an terdapat 9 persetujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sepanjang tahun 2000 sampai Februari 2001, kedua negara telah menambah lagi jumlah persetujuan sebanyak 7 buah dan beberapa proyek kesepakatan lainnya untuk kedepannya.

Kerja sama politik antar Indonesia dengan Korea Selatan meningkat tajam dalam dekade terakhir ini dengan semakin

bertambahnya ikatan kerja sama antara kedua negara yang mencakup bidang ekonomi, politik, keamanan, perdagangan dan sosial budaya. Terutama sejak kedua negara memasuki kemitraan strategis yang ditandai dengan penandatanganan Joint Declaration on Strategic Partnership oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korsel Roh Moo Hyun pada tanggal 4 Desember 2006 di Jakarta. Joint Declaration tersebut mencakup 3 (tiga) pilar kerja sama, kerja sama politik dan keamanan, kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi, serta kerja sama sosial budaya. Di bidang politik, hubungan dan bobot kerja sama politik RI-ROK terus terjaga dan menguat dengan intensitas kunjungan high dignitaris kedua negara baik pejabat tinggi RI ke Korea Selatan maupun sebaliknya yang cukup tinggi.¹

Untuk memperkokoh hubungan antara kedua negara dalam rangka lebih memajukan hubungan kerja sama, kedua negara tersebut membuat sebuah program pengembangan pesawat tempur yang bertujuan dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan kedua negara dalam waktu 30–40 tahun kedepan. Dinamakan Korea Fighter Xperiment/ Indonesia Fighter Xperiment atau KFX/IFX. Pesawat tempur ini sendiri sebenarnya merupakan proyek lama Republic Air Force (ROKAF) yang baru bisa terlaksana sekarang. Proyek ini

¹ Bilateral RIKORSEL, (diakses pada <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/i d/indokor>, tanggal 16 April 2018 pukul 07.34 WIB).

digagas presiden Korea Kim Dae-Jung pada bulan maret 2001 untuk menggantikan pesawat-pesawat yang lebih tua seperti F-4D/E Phantom II dan F-5E/F Tiger. Dibandingkan F-16, KAI KF-X diproyeksi untuk memiliki radius serang lebih tinggi 50 persen, system avionic yang lebih baik serta kemampuan anti radar (stealth). Pemerintah Korea bersedia menanggung 60 persen biaya pengembangan pesawat, sejumlah industry dirgantara Negara itu diantaranya Korean Aerospace Industry menanggung 20 persennya. Pemerintah Indonesia menanggung 20 persen dan memperoleh 80 (delapan puluh) pesawat ini dan 120 (seratus dua puluh) pesawat untuk Korea. Penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara Indonesia dengan Korea Selatan telah dilakukan pada 15 juli 2010 yang lalu di Seoul, Korea selatan, dan diharapkan pada tahun 2020 sudah ada regenerasi pesawat tempur untuk kedua belah pihak.

Industri pertahanan Korea Selatan sendiri baru mulai memproduksi senjata secara signifikan mulai tahun 1970an dimana sebelum itu untuk keperluan militernya sangat bergantung pada Amerika Serikat. Namun karena didorong oleh beberapa faktor seperti ancaman dari Korea Utara, Korea Selatan berniat memperkuat status politik militer mereka di kawasan Asia Timur dan mendorong kemajuan ekonomi dengan menggunakan produksi persenjataan dan alih teknologi serta

modal yang turut menyertainya sebagai pendorong industrilisasi tahap lanjut.²

Usaha pemerintah Korea Selatan dalam bidang dirgantara yang signifikan 1-2 dekade terakhir dapat ditinjau dari usaha konsolidasi industry pesawat terbang yang berhasil meleburkan 3 perusahaan local yang saling bersaing menjadi satu entitas, yakni KAI (Korea Aerospace Industries) pada 1999, persaingan ketat dan cost structure antar perusahaan yang tidak sehat yang menjadi penghambat dari kemajuan industry, sehingga pemerintah merasa perlu turun tangan.³

Dari pihak Indonesia, Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) yang didirikan pada tahun 1967 yang sekarang dikenal dengan nama PT. Dirgantara Indonesia adalah rekanan proyek KAI KF-X / IF-X yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. PT.DI adalah industri pesawat terbang pertama dan satu- satunya di wilayah Asia Tenggara, dengan Presiden Direktur pertamanya BJ Habibie. Pada tanggal 6 Oktober 2014, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani Project Agreement sebagai awal dimulainya fase EMD project jet tempur KFX/IFX ini. Dalam agreement tersebut, disebutkan bahwa kerja sama proyek ini akan ditanggung sebesar 80% oleh Korea yang akan dibagi dua dimana 60% akan ditanggung

² Richard Bitzinger, "South Korea's Defense Industry at the Crossroads", dalam The Korean Journal of Defense Analysis, Vol 7, No 1, Summer, 1995, hal. 235.

³ Myong-Chin Cho, "Restructuring of Korea's Defense Aerospace Industry : Challenge and Opportunities?" paper28, Bonn International Center for Convesion, 2005, hal.43.

pemerintah Korea dan 20% oleh kontraktor utama yang diperebutkan KAI dan KAL yang merupakan perusahaan milik Korea, dan 20% sisanya oleh Indonesia.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu: “Mengapa Indonesia Melakukan Kerja sama dengan Korea Selatan dalam Pengembangan Pesawat Jet KFX /IFX?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan, karena tujuan serta motif menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. Maka dari itu, penulis menganggap bahwa ada kepentingan nasional dari Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan Korea Selatan.

D. Kerangka Dasar Teori

Dalam kajian hubungan internasional, tujuan negara lebih sering disebut dalam konsep kepentingan nasional (*national interest*). Kebutuhan serta kemampuan mempunyai hubungan yang saling berkaitan untuk memenuhi dalam konteks politik luar negeri. Secara konseptual, kemampuan domestic dalam memenuhi kebutuhan negara sering dianggap sebagai kekuatan nasional (*national power*).

⁴ Tender Kontraktor Utama Project KFX/IFX di Korea, (diakses pada http://analisismiliter.com/artikel/part/105/Tender_Kontraktor_Utama_Project_KFXIFX_di_Korea, tanggal 23 April 2018 pukul 20.32 WIB).

Kebutuhan, tuntutan, dan konsekuensi domestic sering dikonsepsikan dalam kepentingan nasional.⁵

Dalam menganalisis kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan, penulis menggunakan teori Kepentingan Nasional (*National Interest*). Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan –tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa/negara sehubungan dengan kebutuhan serta hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif dan sama di antara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan (*prosperity*). Kedua hal pokok tersebut merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional setiap negara.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi Politik, ekonomi, Militer, dan sosial budaya. Kepentingan ini juga didasari akan suatu power atau kekuatan yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar mendapat pengakuan dunia. Dalam kepentingan nasional peran negara yaitu sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memainkan peranan penting dalam pergaulan internasional serta berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya.

⁵ Andi Purwono, *Analisa politik Luar Negeri*, (Semarang: Diktat Mata Kuliah, Unwahas) 2007

Kepentingan nasional merupakan konsep suatu Negara dalam melakukan hubungan kerjasama dengan Negara-negara di dunia. Kepentingan nasional merupakan pilar utama tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realistis karena kepentingan nasional menentukan tindakan politik suatu Negara. Jika dipahami menggunakan pendekatan realis atau neorealis maka kepentingan nasional diartikan sebagai kepentingan negara, *unitary actor* yang penekanannya pada peningkatan kekuasaan nasional (*national power*) untuk mempertahankan keamanan nasional dan survival dari negara tersebut. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu Negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol atas suatu negara terhadap negara lain.

Kepentingan nasional kerap kali juga dikatakan sebagai tujuan utama suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain yang tentunya banyak mengusung berbagai macam *entry point* yang secara umum menjadi tujuan-tujuan dari kerjasama atau hubungan yang dijalin. Maka dari hubungan tersebut kepentingan nasional muncul sebagai target dari hubungan kerjasama, baik secara bilateral maupun multilateral secara garis besarnya, tetapi secara khusus dari tujuan-

tujuan tadi pada akhirnya inti dari hubungan itu adalah kepentingan nasional.

Dalam menganalisis hubungan antar negara, konsep kepentingan nasional adalah sebuah konsep yang sangat lazim dan juga populer digunakan. Konsep ini digunakan sebagai barometer keberhasilan suatu politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara, seperti yang dikemukakan oleh Morgenthau (1990) bahwa:

Kepentingan yang sebenarnya dari suatu bangsa merupakan kenyataan obyektif yang bisa digambarkan dan bahwa dengan membuat outline tentang kenyataan itu, analisis-analisis bisa menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai pengukur sesuai atau tidaknya, benar atau tidaknya berbagai politik luar negeri yang dijalankan.

Hans J. Morgenthau didalam "*The Concept of Interest defined in Terms of power*", konsep kepentingan nasional (*national interest*) yang didefenisikan dalam istilah "*power*" menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal, atau "*reason*" yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional.⁶

⁶ Aleksius jemadu, *Politik Global Dalam Teori dan Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hal. 67.

Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nation* menyebutkan bahwa :

“Power atau kekuatan Negara mempunyai Sembilan unsur, yaitu, geografi, sumber pendapatan alami untuk makanan dan bahan mentah, kemampuan industry, military preparedness yaitu teknologi, kepemimpinan, kuantitas dan kualitas angkatan perang, populasi yang terdiri dari persebaran dan kualitasnya, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan”⁷.

Dalam pandangan **Morgenthau**, kepentingan nasional yakni:

“Kemampuan minimum yang inheren dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (survival). Kemampuan minimum Negara bangsa ini, yakni melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan Negara bangsa lain. Dalam pengertian lebih spesifik, Negara bangsa harus bias mempertahankan integritas teritorialnya, rezim ekonomi-politiknya, serta memelihara norma-norma etnis, religious, linguistik, dan sejarahnya”⁸.

Dalam menggambarkan kepentingan nasional bahwa negara-negara berusaha untuk mengamankan klasifikasi dua kali lipat umumnya dibuat Komponen Penting atau Penting dari Kepentingan Nasional dan Komponen Variabel atau Non-vital dari Kepentingan Nasional.

a. **Komponen Yang Diperlukan atau Vital**

Menurut Morgenthau, komponen penting dari kepentingan nasional yang diinginkan oleh kebijakan luar negeri adalah

⁷ Sri Hayati, Ahmad Yani, *Geografi Politik*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hal. 64.

⁸ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi*, cetakan kedua, LP3ES, Jakarta, hal. 141.

bertahan hidup atau identitas. Dia membagi identitas menjadi tiga bagian : identitas fisik, identitas politik, dan identitas budaya. Identitas fisik termasuk identitas teritorial. Identitas politik berarti sistem politik-ekonomi. Dan identitas Budaya merupakan nilai-nilai historis yang ditegakkan oleh suatu bangsa sebagai bagian dari warisan budayanya. Ini disebut komponen vital karena ini sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan dapat dengan mudah diidentifikasi dan diperiksa. Suatu bangsa bahkan memutuskan untuk pergi berperang demi mengamankan atau melindungi kepentingan vitalnya.

Suatu bangsa selalu merumuskan keputusan kebijakan luar negerinya dengan tujuan untuk mengamankan dan memperkuat keamanannya. Upaya-upaya untuk mengamankan perdamaian dan keamanan internasional, yang dibuat oleh negara-negara, sedang dibuat karena hari ini keamanan masing-masing negara tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dan keamanan internasional. Keamanan adalah komponen vital dari kepentingan nasional. Setiap bangsa selalu berusaha mengamankan kepentingan vitalnya bahkan dengan perang.

b. Komponen Non-vital atau Variabel dari Kepentingan Nasional

Komponen non vital adalah bagian dari kepentingan nasional yang ditentukan baik oleh keadaan atau oleh

kebutuhan untuk mengamankan komponen vital. Ini ditentukan oleh sejumlah faktor pembuat keputusan, opini publik, politik partai, kepentingan kelompok atau kelompok, dan folkways politik dan moral.

“Kepentingan variabel ini adalah keinginan dari masing-masing negara yang mereka, tidak diragukan lagi, ingin melihat terpenuhi tetapi mereka tidak akan berperang. Sedangkan kepentingan vital dapat diambil sebagai tujuan, kepentingan sekunder dapat disebut sebagai tujuan kebijakan luar negeri.”

Tujuan-tujuan ini telah terdaftar oleh V.V. Dyke dan daftarnya meliputi : Kemakmuran, Perdamaian, Ideologi, Keadilan, Prestise, Pengagungan dan Kekuasaan. Meskipun setiap negara mendefinisikan tujuan-tujuan ini dengan cara yang sesuai dengan kepentingannya dalam mengubah keadaan, namun tujuan-tujuan ini dapat digambarkan sebagai umum untuk hampir semua negara bagian. Dengan demikian, kepentingan nasional yang dicari oleh suatu negara dapat secara umum dikategorikan ke dalam dua bagian ini.⁹

Menurut **Ratzel** ada tiga fakta geografis yang menentukan sifat-sifat pertumbuhan suatu Negara:

1. Suatu negara bersifat territorial, artinya meliputi suatu teritorial tertentu, karena itu negara sebagai suatu organisme spatial memiliki lokasinya tertentu, yang dapat ditaksir secara fisis maupun geografi

⁹ [Hifza Shaheen](https://www.quora.com/What-are-the-components-of-national-interest), International Relations & South Asian Studies, (diakses pada <https://www.quora.com/What-are-the-components-of-national-interest>, tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.47 WIB).

politik dalam hubungannya dengan Negara-negara lainnya, sebagai pusat-pusat kekuatan politik.

2. Negara itu mencerminkan suatu kelompok penduduk atau bangsa yang merasakan dirinya tak terpisahkan dari wilayah geografis negaranya, dan yang bertambah jumlahnya terus-menerus mengikuti proses pertumbuhan negaranya.
3. Negara berkembang didalam batas-batas kerangka alami (natural framework), dari pusatnya yang sempit, negara meluas ke arah luarnya, yang dalam gagasan kemudian melahirkan istilah perbatasan dalam sebutan natural frontier.¹⁰

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formasi politik yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya di dalam mekanisme interaksinya masing-masing, negara atau actor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep “*power*” kepentingan “*interest*” di defenisikan ke dalam terminologi power.¹¹

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah

¹⁰ N. Daldjoeni, *Dasar-Dasar Geografi Politik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 Hal.53.

¹¹ Antonius Sitepu, *Teori Realisme Politik Hans. J. Morgenthau Dalam studi Politik dan HI*, hal. 56.

(Coghlan & Brannick 2010; Collis & Hussey 2003; Leedy & Omrod 2005).¹² Setiap Metode Penelitian disusun berdasarkan dan dipengaruhi oleh asumsi filosofis penelitian yang dianut oleh sang poeneliti. Metode Penelitian yang berbeda mensyaratkan penguasaan kemampuan dan alat yang berbeda. Metode Penelitian menentukan bagaimana data penelitian dikumpulkan.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Sedangkan penelitian deskriptif artinya melukiskan variable demi variable, satu demi satu.

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk :

- a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada;
- b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku;
- c. Membuat perbandingan atau evaluasi.¹³

Metode deskriptif pada hakekatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori.¹⁴

¹² Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar – Dasar*. 2012. Jakarta : PT Indeks, h. 36

¹³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 22.

2. Jenis Data dan Sumbernya

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung dari aktor – aktor terkait misalnya aktor negara. Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari berbagai literatur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumen dengan cara mengumpulkan berbagai macam sumber informasi dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Sumber literatur tersebut diantaranya: buku, jurnal, dokumen, makalah, surat kabar, artikel dan internet.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif dengan urutan:

- a. Reduksi Data, yaitu proses menyempurnakan data, baik mengurangi data yang dirasa kurang relevan maupun menambah data yang dirasa masih kurang.
- b. Penyajian Data. Penyajian data di sini sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

¹⁴ Ibid

pengambilan tindakan. Penyajian data ini berbentuk teks naratif.

- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data. Proses ini dijelaskan bagaimana mulai mencari makna terkait faktor pendorong kepentingan Indonesia dalam pengembangan pesawat Jet KFX/IFX dengan Korea Selatan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian secara sistematis dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulisan skripsi dengan judul "*Kepentingan Indonesia dalam Pengembangan Pesawat Jet KFX/IFX dengan Korea Selatan*" ini dibagi menjadi empat bab dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan gambaran umum pengembangan Pesawat Jet KFX/IFX yang memuat sejarah industri pesawat di Indonesia, sejarah industri pesawat di Korea Selatan, dan sejarah Proyek KFX/IFX.

BAB III merupakan alasan kepentingan Indonesia melakukan kerja sama yang memuat penjelasan mengenai alasan pertahanan, alasan politik, dan alasan ekonomi.

BAB IV adalah bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran.